

Analisis hukum kebijakan moneter dalam mengatasi krisis ekonomi global: Problematika dan implementasi

Ummi Pakhriah¹, Akhmad Farroh Hasan²

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang;

e-mail: ¹ummipakhriah2@gmail.com, ²akhfarroh.hasan@hbs.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Hukum, krisis ekonomi global, problematika, implikasi, kebijakan moneter

Keywords:

Law, global economic crisis, problems, implications, monetary policy

ABSTRAK

Analisis hukum mengenai kebijakan ekonomi pemerintah dalam menghadapi krisis ekonomi global menunjukkan betapa rumitnya hubungan antara perlunya fleksibilitas dalam pengambilan kebijakan darurat dan prinsip-prinsip negara hukum. Penelitian ini menjelaskan bahwa sistem hukum di Indonesia sering kali menghadapi dilema, antara memberikan kekuasaan diskresi yang cukup kepada pihak eksekutif dan memastikan batasan yang ditetapkan oleh konstitusi. Salah satu masalah utama yang muncul adalah adanya kekosongan dalam hukum biasa yang mendorong pemerintah untuk menggunakan instrumen hukum darurat seperti Perppu, yang bisa menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, terdapat konflik antara efisiensi dari kebijakan darurat dan prinsip legalitas, serta risiko penyalahgunaan kekuasaan eksekutif tanpa adanya mekanisme checks and balances yang memadai. Masalah-masalah ini mengindikasikan perlunya adanya kerangka hukum yang lebih spesifik untuk mengatur protokol dalam situasi krisis nasional, penyertaan prinsip keadilan dalam peraturan darurat, dan peningkatan pengawasan dari parlemen terhadap kebijakan fiskal dan moneter darurat. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan sebuah model hukum hybrid yang dapat menggabungkan fleksibilitas administratif dengan prinsip rule of law yang substansial, sehingga kebijakan krisis tetap bisa dipertanggungjawabkan dan responsif terhadap perubahan global.

ABSTRACT

A legal analysis of the government's economic policy in the face of the global economic crisis shows the complex relationship between the need for flexibility in emergency policy-making and the principles of the rule of law. The research explains that the legal system in Indonesia often faces a dilemma, between giving sufficient discretionary power to the executive and ensuring the limits set by the constitution. One of the main problems that arise is the existence of lacunae in the ordinary law which encourages the government to use emergency legal instruments such as Perppu, which can lead to legal uncertainty. In addition, there is a conflict between the efficiency of emergency policies and the principle of legality, as well as the risk of abuse of executive power in the absence of adequate checks and balances mechanisms. These issues indicate the need for a more specific legal framework to regulate protocols in situations of national crisis, the inclusion of principles of fairness in emergency regulations, and increased parliamentary oversight of emergency fiscal and monetary policies. Therefore, this study recommends a hybrid legal model that can combine administrative flexibility with substantial rule of law principles, so that crisis policies remain accountable and responsive to global changes.



This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Krisis ekonomi merupakan fenomena yang sangat ditakutkan oleh banyak negara di seluruh dunia. Ketika situasi ini terjadi, baik pemerintah maupun masyarakat akan menanggung kerugian. Krisis ekonomi merujuk pada keadaan di mana penurunan besar terjadi dalam perekonomian suatu negara. Biasanya, negara yang mengalami peristiwa ini akan melihat penurunan dalam PDB (produk domestik bruto), jatuhnya nilai pasar properti dan saham, serta variasi harga yang disebabkan oleh inflasi. Dampak dari inflasi terhadap individu dengan pendapatan tetap atau yang tidak merasakan kenaikan gaji adalah keinginan mereka untuk mengurangi barang yang mereka beli. Beberapa individu mungkin akan mengurangi jumlah tabungan dan investasi mereka, bahkan menariknya untuk mempertahankan pola konsumsi. Terlihat jelas bahwa dampak inflasi sering kali merugikan perekonomian karena lonjakan harga biasanya menurunkan hasil ekonomi. Ketika pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan harga konstan, penurunan terjadi, bahkan dapat merugikan pertumbuhan sama sekali(Sodik et al., 2024).

Krisis ekonomi global sering kali menjadi tantangan besar bagi negara-negara di dunia. Fenomena ini biasanya muncul karena faktor-faktor luar, seperti penurunan harga barang, konflik geopolitik, atau pandemi, dan dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Salah satu alat utama yang digunakan pemerintah untuk mengatasi dampak dari krisis ini adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter mencakup pengaturan suku bunga, pengendalian inflasi, dan pengelolaan jumlah uang yang beredar, memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi(Achmad Fauzi et al., 2023).

Masyarakat yang menghadapi krisis cenderung mengambil tindakan serupa. Mereka mulai dengan mengurangi konsumsi, mengurangi utang, dan meningkatkan tabungan. Hampir semua tindakan yang diambil oleh bisnis dan masyarakat dalam menghadapi krisis berpotensi menurunkan output ekonomi. Perppu Nomor 2 Tahun 2008 mengenai Amandemen Kedua terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia merupakan ilustrasi nyata pemanfaatan alat hukum darurat untuk mempertahankan kestabilan sektor keuangan nasional di tengah krisis global. Ketika mayoritas dari masyarakat dan pelaku usaha meyakini bahwa krisis ekonomi akan datang, kemungkinan besar perekonomian akan terjerumus lebih dalam. Situasi ini sungguh menakutkan. Alasannya, banyak pihak yang akan merasakan dampak negatif jika suatu negara dilanda krisis ekonomi. Tanda-tanda yang muncul saat krisis ekonomi biasanya dimulai dengan pemotongan pengeluaran pemerintah. Selanjutnya, angka pengangguran bisa melebihi 50% dari total angkatan kerja. Selain itu, ada peningkatan harga barang pokok yang menjadi tidak terkendali, pengurangan konsumsi yang cukup besar, fluktuasi nilai tukar yang tidak stabil, dan tekanan berat terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian, penyebab mengapa krisis yang dialami oleh suatu negara berdampak pada fondasi atau basisnya adalah karena efek yang ditimbulkan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk pemerintah dan masyarakat luas. Dalam penelitian ini, akan dibahas faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya krisis-krisis tersebut di Indonesia serta dampaknya terhadap kondisi dasar suatu negara(Annisa & Riofita, 2024).

Pembahasan

Krisis Global dan Kebijakan Moneter

Krisis global adalah keadaan yang mengganggu keseimbangan ekonomi dunia. Serangkaian gangguan dalam sektor keuangan, energi, atau politik internasional sering kali menjadi penyebabnya. Kebijakan moneter memiliki peranan penting dalam menangani dampak tersebut dan menjaga stabilitas ekonomi. Dua peristiwa besar yang bisa dijadikan contoh adalah Krisis Keuangan Global tahun 2008 dan Krisis Energi di tahun 1970an.

Penyebab Krisis Keuangan Global 2008 adalah tumbangnya pasar properti di Amerika Serikat yang terjadi karena pemberian kredit berisiko tinggi, dikenal sebagai subprime mortgage. Ketika nilai properti jatuh, bank besar seperti Lehman Brothers mengalami kebangkrutan, yang menyebabkan runtuhnya kepercayaan di pasar dan memicu resesi di seluruh dunia. Sebagai respon, bank sentral seperti Federal Reserve menurunkan suku bunga secara drastis dan memperkenalkan program Quantitative Easing (QE) untuk memasukkan lebih banyak uang ke dalam sistem. Langkah ini mendukung stabilitas di sektor keuangan dan membantu pemulihan ekonomi secara bertahap.

Krisis Energi di tahun 1970an, di sisi lain, disebabkan oleh lonjakan harga minyak yang akibat embargo dari negara-negara OPEC, menciptakan ketidakstabilan ekonomi global. Kejadian ini ditandai oleh stagflasi, yaitu situasi di mana inflasi tinggi terjadi bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah. Selain inflasi, pengangguran dan pertumbuhan ekonomi merupakan variabel penting dalam mengukur kesejahteraan masyarakat (Pradanimas et al., 2024). Bank sentral di berbagai negara merespons dengan menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi, meskipun keputusan ini berujung pada perlambatan dalam kegiatan ekonomi. Dalam situasi krisis tersebut, kebijakan moneter sangat berperan dalam menjaga stabilitas dengan memastikan likuiditas tetap tersedia di pasar, mengontrol inflasi, dan memfasilitasi pemulihan ekonomi. Di antara alat yang sering dipakai adalah pengurangan suku bunga, operasi pasar terbuka, dan QE. Namun, pelaksanaan kebijakan ini tidak tanpa tantangan, seperti efek yang lambat terlihat dan potensi inflasi yang berlebihan jika tidak diawasi dengan baik (Jalil et al., 2024).

Ketidakseimbangan Ekonomi dan Dampaknya terhadap Kebijakan

Ketidakseimbangan ekonomi terjadi saat terdapat ketidakstabilan atau ketidaksimetrisan dalam elemen-elemen penting dari ekonomi suatu negara, seperti perdagangan, pembayaran, atau anggaran negara. Ketidakseimbangan ini bisa termasuk defisit yang besar dalam neraca perdagangan atau pembayaran, defisit anggaran yang signifikan, atau ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran di sektor-sektor penting ekonomi. Dampak dari ketidakseimbangan ekonomi ini sangat kompleks dan bervariasi. Salah satu efek yang terlihat adalah pengaruhnya terhadap kebijakan ekonomi, khususnya dalam kebijakan moneter dan fiskal. Menurut (Julaihah & Insukindro, 2004), kebijakan moneter memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel-variabel makroekonomi di Indonesia, seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat

pengangguran, terutama pada periode 1983 hingga 2003. Dalam kebijakan moneter, ketidakseimbangan ekonomi dapat menimbulkan tekanan pada nilai mata uang negara dan berdampak pada kebijakan suku bunga. Contohnya, saat terjadi defisit anggaran yang besar, pemerintah mungkin akan lebih cenderung mencetak uang tambahan untuk menutupi pengeluaran, yang dapat berujung pada inflasi.

Hal ini dapat memaksa bank sentral untuk menaikkan suku bunga demi mengendalikan inflasi, namun peningkatan suku bunga ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Sedangkan dalam kebijakan fiskal, ketidakseimbangan ekonomi sering membatasi kemampuan pemerintah dalam menerapkan kebijakan fiskal yang ideal, seperti program stimulus atau investasi infrastruktur, karena adanya batasan anggaran. Ketidakseimbangan ekonomi dapat menghadirkan tantangan besar dalam merancang dan melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang efektif. Untuk merumuskan kebijakan tersebut, pemerintah harus memperhatikan ketidakseimbangan ini dengan berusaha mengurangi defisit, meningkatkan pendapatan, atau mengelola dengan bijak berbagai elemen ekonomi demi mencapai keseimbangan yang lebih baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.(Annisa & Riofita, 2024)

Implementasi Kebijakan Ekonomi

Pelaksanaan yang Berhasil:

- a. Pengawasan yang Teliti: Diperlukan sistem pengawasan yang solid untuk memastikan kebijakan dijalankan sesuai dengan rencana.
- b. Informasi kepada Publik: Bank pusat harus mengomunikasikan tujuannya dan tindakan kebijakannya kepada publik agar kepercayaan tetap terjaga(Jalil et al., 2024).

Pelaksanaan kebijakan hukum ekonomi berkaitan dengan kebijakan moneter dalam menghadapi krisis ekonomi global memerlukan kombinasi alat kebijakan yang adaptif dan kreatif, serta dukungan regulasi hukum yang tahan banting dan dapat dipercaya. Selain itu, koordinasi antar sektor serta kerjasama internasional juga sangat diperlukan. Adanya kerangka hukum yang tegas sangat krusial untuk memastikan legitimasi dan efektivitas dari kebijakan moneter, terutama pada saat-saat kritis. Pengalaman Indonesia menunjukkan betapa pentingnya penyesuaian kebijakan yang tanggap dan kolaborasi antara kebijakan moneter serta fiskal untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas dalam jangka panjang(Putri et al., 2025). Dalam perspektif hukum ekonomi, (Lutfi & Supriyadi, 2021) memandang bahwa upaya pemulihan ekonomi nasional seperti pada pasca pandemi Covid-19 merefleksikan pentingnya peran negara dalam memastikan tercapainya kesejahteraan rakyat sesuai konstitusi.

Kesimpulan dan Saran

Kebijakan moneter memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi negara, terutama dalam keadaan krisis ekonomi global. Namun, ketika melihat penerapan kebijakan ini di Indonesia dari sudut pandang hukum, terlihat adanya konflik antara fleksibilitas yang dibutuhkan untuk keputusan darurat dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Terkadang, sistem hukum nasional mengalami kekurangan regulasi yang

membuat pemerintah menggunakan instrumen hukum darurat seperti Perppu. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dan kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh eksekutif. Permasalahan utama dalam penerapan kebijakan moneter saat krisis terletak pada pertentangan antara efisiensi kebijakan darurat dan aturan hukum, serta lemahnya mekanisme pengawasan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan.

Masalah ini menunjukkan pentingnya adanya kerangka hukum yang jelas dan definitif untuk mengatur penanganan krisis ekonomi nasional. Ini termasuk penerapan prinsip-prinsip keadilan dalam kebijakan darurat dan peningkatan pengawasan oleh lembaga legislatif terhadap kebijakan fiskal dan moneter yang bersifat darurat. Oleh karena itu, disarankan agar model hukum hibrida yang mengintegrasikan fleksibilitas administratif dengan prinsip hukum yang substansial diadopsi, sehingga kebijakan krisis tetap dapat dipertanggungjawabkan, responsif, dan mampu menghadapi tantangan global dengan baik.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas kebijakan moneter saat menghadapi krisis ekonomi global, diperlukan adanya pembaruan dalam regulasi yang dapat memastikan keseimbangan antara diskresi eksekutif dan hukum. Hal ini juga harus menjelaskan cara pengawasan dan memperbaiki transparansi serta akuntabilitas dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan moneter darurat. Kerja sama antar sektor dan peningkatan koordinasi antara otoritas fiskal, moneter, dan legislatif sangat penting untuk menghasilkan respons kebijakan yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Achmad Fauzi, Rudi Laksono, Al Humaira, B., Fitri Amaliyah Sholehah, Nur Hikmah, Putri Netasya Sari, Syifa Febya Permadi, & Tiwi Nurnezi. (2023). ANALISIS STATUS DAN KEDUDUKAN BANK INDONESIA SEBAGAI PELAKSANA KEBIJAKAN MONETER DALAM MENANGANI INFLASI MENGGUNAKAN PENERAPAN ITF (INFLATION TARGETING FRAMEWORK). *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2), 76–85. <https://doi.org/10.56127/jekma.v2i2.649>
- Annisa, R. D., & Riofita, H. (2024). Tantangan Implementasi Kebijakan Moneter dan Fiskal di Negara-Negara Berpenghasilan Rendah: Tinjauan Literatur. *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1(2), 475–480. <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v1i2.2473>
- Jalil, A., Kasnelly, S., & Agustia, I. (2024). Dampak Kebijakan Moneter Terhadap Stabilitas Ekonomi Di Tengah Krisis Global. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(II), 105–119.
- Julaiyah, U., & Insukindro, I. (2004). Analisis dampak kebijakan moneter terhadap variabel makroekonomi di Indonesia Tahun 1983.1-2003.2. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 7(2), 323–341. <https://repository.uin-malang.ac.id/20639/>
- Lutfi, M., & Supriyadi, A. P. (2021). Politik Hukum Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 Perspektif Konstitusi Ekonomi. *De Jure: Jurnal Hukum & Syariah*, 13(2), 203–221. <https://repository.uin-malang.ac.id/10076/>
- Pradanimas, A., Lifia, L., & Yuliana, I. (2024). Kesejahteraan masyarakat diukur melalui pengagguran, inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah,

- Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(5), 3378–3391. <https://repository.uin-malang.ac.id/19645/>
- Putri, D. N., M Manurung, C., Putri, A., Alnaya, D., & Sanggam, D. (2025). Analisis Kebijakan Moneter dalam Mengatasi Krisis Ekonomi Global. *Journal of Management Accounting, Tax and Production*, 3(1), 72–78. <https://doi.org/10.57235/mantap.v3i1.4759>
- Sodik, F. J., Rachmansyah, F., Ananda, D. D., Wicaksono, D., & Fadilla, A. (2024). Tantangan dan Peluang Kebijakan Moneter bagi Negara Berkembang di Era Globalisasi. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(3), 1–7. <https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i3.198>